

## **ABSTRAK**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ( UU MD3 ).

Penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peran DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi anggaran dan kendala apa saja yang dihadapi? Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya DPRD Kota Semarang sebagai lembaga Legislatif daerah dalam kaitannya melaksanakan fungsi anggaran melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat dengan Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dibuktikan dengan adanya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat

yang berasal dari partai politik yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu legislatif. Oleh sebab itu, DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Keberadaan DPRD kota Semarang diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan masyarakat kota Semarang.

## **ABSTRACT**

Regional Representatives Council (DPRD abbreviated) is the representative body of the people domiciled area as an element of the regional administration in the provincial / district / city) in Indonesia. Parliament is mentioned in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 18, paragraph 3: "The provincial, district, and the city has a regional council whose members are elected through general elections". Parliament further regulated by law, the latter through Act No. 17 of 2014 (Act MD3). Authors formulate the problem in this research is about how the role of Semarang City Council in carrying out the function of the budget and any obstacles encountered? The purpose of these studies was to determine and describe the efforts of Semarang City Council as the legislative area in relation melaksanakan function of the budget through the patterns of aspiration society by method used socio-juridical, meaning that a study of the real state of society or community environment. These results indicate that the function of the budget is a function of Parliament together local governments to develop and establish the Regional Budget which includes a budget to carry out the functions, duties and authority of the Regional Representatives Council. evidenced by the Parliament as a representative institution of the people who come from political parties were selected based on the results of the legislative elections. Therefore, Parliament is the elected representatives as the voice of the community. The existence of Semarang city parliament is expected to be a bridge for the community to channel people's desire Semarang.